

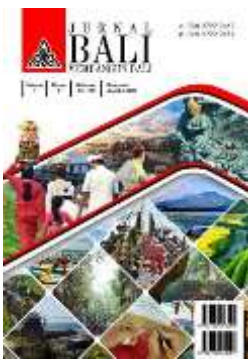


Konvergensi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Sebagai Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Kota Denpasar, Provinsi Bali

Kadek Dwi Sutrisna

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

email: kadekdwisutrisna@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Juni 2026

Direvisi pada
6 Juli 2026

Disetujui pada
27 Juli 2026

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) dan Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta merumuskan strategi penguatan tata kelola yang relevan bagi perencanaan pembangunan daerah.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur berdasarkan data sekunder, meliputi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), laporan resmi pemerintah, serta jurnal ilmiah tahun 2021-2026. Data dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kondisi, isu strategis, dan alternatif kebijakan.

Hasil dan Pembahasan: Provinsi Bali mencatat prevalensi stunting terendah secara nasional (8,7% pada SSGI 2024), namun Kota Denpasar sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi justru mencatat 10,4% berdasarkan SSGI 2024, berbeda jauh dengan klaim capaian pemerintah kota berbasis data pencatatan lokal yang berada di kisaran 1,9% pada 2025. Perbedaan ini mengindikasikan persoalan mendasar pada validitas dan integrasi data antarsistem (SSGI/SKI, e-PPGBM, dan Sigenting), yang berdampak pada ketepatan sasaran maupun keandalan pemantauan capaian SDGs di tingkat kota. Pelaksanaan delapan aksi konvergensi telah berjalan namun masih parsial, dengan koordinasi lintas perangkat daerah dan kelurahan/desa yang belum sepenuhnya optimal, sementara karakteristik urban Denpasar (kepadatan tinggi, populasi migran non-permanen) menambah kompleksitas penajaman sasaran.

Implikasi: Percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar memerlukan penguatan satu data terpadu, penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat banjar/lingkungan, pendekatan berbasis kearifan lokal, serta pelembagaan pelaporan stunting sebagai bagian resmi dari mekanisme pemantauan capaian SDGs daerah, agar penurunan stunting benar-benar berkontribusi terukur terhadap pencapaian target SDGs Kota Denpasar.

Kata Kunci: stunting; konvergensi kebijakan; SDGs; tata kelola; Kota Denpasar.

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the convergence of stunting reduction policy in Denpasar City within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 2 (Zero Hunger) and Goal 3 (Good Health and Well-being), and to formulate governance strengthening strategies relevant to regional development planning.

Research Methods: This study employed a qualitative approach through a literature review based on secondary data, including the Indonesian Nutritional Status Survey (SSGI) and Indonesian Health Survey (SKI), official government reports, and scientific journals published between 2021 and 2026. Data were analyzed descriptively to map conditions, strategic issues, and policy alternatives.

Results and Discussion: Bali Province recorded the lowest national stunting prevalence (8.7% based on the 2024 SSGI), yet Denpasar City, as the most densely populated area, recorded 10.4% according to the same survey, sharply contrasting with the city government's locally recorded figure of around 1.9% in 2025. This discrepancy points to fundamental data validity and integration issues across systems (SSGI/SKI, e-PPGBM, and Sigenting), affecting targeting accuracy and the reliability of SDG monitoring at the



city level. The eight convergence actions have been implemented but remain partial, with cross-sectoral and village/sub-district coordination not yet optimal, while Denpasar's urban characteristics add complexity to target precision.

Implications: Accelerating stunting reduction in Denpasar City requires strengthening integrated data systems, reinforcing the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) down to the neighborhood level, applying locally rooted approaches, and institutionalizing stunting reporting as part of the city's formal SDG monitoring mechanism.

Keywords: stunting; policy convergence; SDGs; governance; Denpasar City **Kata Kunci:** transformasi digital; UMKM; ekonomi kreatif; desain kebijakan; profil kesiapan digital.

PENDAHULUAN

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menempatkan penghapusan segala bentuk kelaparan dan malnutrisi sebagai bagian dari Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) serta peningkatan derajat kesehatan sebagai bagian dari Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dengan target eksplisit mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pencapaian target internasional terkait stunting dan wasting pada anak di bawah lima tahun paling lambat tahun 2030. Stunting, sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terus menjadi salah satu indikator kunci dalam pemantauan pencapaian SDGs karena keterkaitannya yang erat dengan kualitas sumber daya manusia jangka panjang (Palastri & Rosdiana, 2026).

Secara nasional, tren prevalensi stunting Indonesia menunjukkan penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 19,8% pada tahun 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan target nasional sebesar 14,2% pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2029. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menetapkan delapan aksi konvergensi sebagai kerangka kerja utama, menguatkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan, serta menekankan pentingnya perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi berbasis data. Kerangka ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Provinsi Bali menempati posisi istimewa dalam peta stunting nasional. Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting Bali tercatat 8,7%, jauh di bawah rata-rata nasional dan merupakan yang terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, meskipun sedikit meningkat dibandingkan capaian SKI 2023 sebesar 7,2% (Bali Post, 2025). Keberhasilan ini banyak dikaitkan dengan komitmen lintas sektor, pemanfaatan

data "*by name by address*", pengembangan sistem informasi Sigenting (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting), serta pendekatan berbasis kearifan lokal seperti pelibatan desa adat dan posyandu berbasis banjar (Bappeda Provinsi Bali, 2025; detikHealth, 2025).

Di balik capaian provinsi yang membanggakan tersebut, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi justru menunjukkan pola yang berbeda. Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting Kota Denpasar tercatat 10,4%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Sebaliknya, Pemerintah Kota Denpasar melaporkan capaian yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 1,9% pada tahun 2025 berdasarkan pencatatan lokal (Media Indonesia, 2025). Kesenjangan angka yang sangat lebar antara data survei nasional dan data administratif kota ini menjadi persoalan strategis tersendiri, karena berpotensi mengaburkan basis bukti (*evidence base*) dalam perencanaan intervensi maupun pelaporan capaian SDGs di tingkat kota.

Kota Denpasar juga memiliki karakteristik urban yang khas, yakni kepadatan penduduk tertinggi di Bali, tingginya arus penduduk pendatang, serta dinamika permukiman tidak tetap (*kos*, kontrakan), yang secara teoritis meningkatkan risiko tidak terakupnya sebagian kelompok sasaran dalam sistem pendataan berbasis domisili tetap (Bali Post, 2025). Kondisi ini menuntut pendekatan konvergensi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik perkotaan, tidak sekadar mereplikasi pendekatan yang efektif di wilayah perdesaan atau semi-perdesaan Bali secara umum.

Kajian literatur mengenai implementasi SDGs di Indonesia secara umum turut mengonfirmasi bahwa tantangan tata kelola lintas sektor menjadi kendala mendasar. Tinjauan literatur komprehensif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs menemukan bahwa meskipun agenda SDGs telah diintegrasikan ke dalam RPJMN dan berbagai program prioritas, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas capaian antarwilayah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (Zen, Mageiasti, & Yulhendri, 2025). Persoalan koordinasi lintas lembaga dan validitas data yang teridentifikasi dalam kajian tersebut sejalan dengan pola yang ditemukan pada kasus percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, sehingga memperkuat relevansi penggunaan kerangka SDGs sebagai lensa analisis dalam tulisan ini, sekaligus menegaskan bahwa persoalan tata kelola data dan koordinasi bukan semata isu sektoral gizi, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi berbagai sektor pembangunan berkelanjutan lain di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis kondisi dan tata kelola konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar dalam

kerangka pencapaian target SDGs, mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan utama, serta merumuskan alternatif penguatan tata kelola yang dapat mendukung sinkronisasi antara upaya penurunan stunting dan pemantauan capaian SDGs di tingkat kota. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan dan evaluasi dokumen RKPD serta Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting (RAD-PPS) di Kota Denpasar dan Provinsi Bali secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) berdasarkan analisis data sekunder. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena pada kondisi yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui analisis terhadap berbagai sumber informasi.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: (1) hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2021-2025; (2) dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar dan Provinsi Bali, serta dokumen aksi konvergensi percepatan penurunan stunting; (3) publikasi resmi kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (4) rilis media resmi pemerintah daerah terkait pelaksanaan rembuk stunting dan pra-musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) aksi konvergensi; serta (5) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas evaluasi kebijakan dan tata kelola konvergensi penurunan stunting periode 2021-2026.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan: (1) pemetaan kondisi eksisting stunting di Kota Denpasar dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali dan nasional; (2) identifikasi isu strategis dan permasalahan berdasarkan sintesis temuan literatur; (3) penyusunan kerangka logis yang menghubungkan input, proses, output, dan outcome aksi konvergensi dengan target SDGs; serta (4) perumusan alternatif kebijakan penguatan tata kelola. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka evaluasi kebijakan Context-Input-Process-Product (CIPP) yang lazim digunakan dalam literatur evaluasi program percepatan penurunan stunting di Indonesia (Palastri & Rosdiana, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan yang secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan yang mencakup 27 desa dan 16 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (2025), jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 755.568 jiwa, atau sekitar 17% dari total penduduk Provinsi Bali, dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota se-Bali. Karakteristik ini menjadikan Kota Denpasar sebagai tujuan utama migrasi penduduk dari kabupaten lain di Bali maupun dari luar Bali, sebagian di antaranya menetap secara tidak permanen di rumah kos, kontrakan, maupun rumah toko.

Dari sisi kelembagaan kesehatan, Kota Denpasar memiliki jaringan layanan kesehatan dasar yang relatif lengkap, mencakup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di setiap kecamatan, jaringan posyandu berbasis banjar, serta struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Ikatan Bidan Indonesia, kantor kementerian agama, camat, perbekel/lurah, hingga Majelis Madya Desa Adat (Barometer Bali, 2026). Struktur kelembagaan yang relatif lengkap ini menjadi modal penting bagi pelaksanaan konvergensi kebijakan, namun sekaligus menuntut mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks dibandingkan wilayah dengan struktur pemerintahan yang lebih sederhana.

Dari sisi determinan yang berkaitan erat dengan capaian SDG 2.2 dan SDG 3, kondisi Provinsi Bali secara umum tergolong baik. Laporan Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi Bali Tahun 2023 mencatat tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25%, rasio Gini sebesar 0,362, proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 98,31%, serta proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 95,70% (Bappeda Provinsi Bali, 2025). Angka akses sanitasi layak Bali tersebut berada di atas rata-rata nasional, yang menurut rilis Statistik Perumahan Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 86,73% pada Maret 2026, meningkat dari 85,37% pada Maret 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Kondisi determinan yang secara agregat baik pada level provinsi ini justru memperkuat pertanyaan mengapa Kota Denpasar sebagai wilayah paling maju infrastrukturnya di Bali tetap mencatat prevalensi stunting SSGI yang relatif tinggi, sehingga isu utamanya kemungkinan besar bukan pada keterbatasan akses layanan dasar semata, melainkan pada persoalan penajaman sasaran dan validitas data sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Isu Strategis dan Permasalahan

Isu strategis utama dalam percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs dapat diidentifikasi ke dalam empat aspek berikut.

Pertama, disparitas dan validitas data. Tabel 1 menunjukkan tren prevalensi stunting nasional dan Bali tahun 2019-2024. Meskipun Provinsi Bali secara konsisten mencatat prevalensi terendah nasional, data spesifik Kota Denpasar menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: SSGI 2024 mencatat prevalensi 10,4%, lebih tinggi dari rata-rata Bali (8,7%) dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara kabupaten/kota se-Bali (Bali Post, 2025). Sebaliknya, Pemerintah Kota Denpasar mengklaim capaian jauh lebih rendah yakni 1,9% pada tahun 2025 melalui data pencatatan berbasis Generasi Maju Bebas Stunting/GMBS dan sistem pencatatan lokal (Media Indonesia, 2025). Kesenjangan sebesar ini melampaui variasi yang lazim ditemukan antara data survei berbasis sampel dan data pencatatan administratif berbasis sensus (e-PPGBM), dan berpotensi menimbulkan bias perencanaan apabila salah satu sumber data dijadikan basis tunggal penentuan target maupun evaluasi capaian SDG 2.2.

Kedua, karakteristik urban dan populasi rentan tidak tetap. Kepadatan penduduk tertinggi di Bali serta tingginya proporsi penduduk pendatang non-permanen menjadi faktor risiko tersendiri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan bahwa tingginya angka SSGI di Kota Denpasar diduga turut dipengaruhi oleh keberadaan penduduk pendatang yang belum memiliki tempat tinggal tetap, sehingga sulit terjangkau oleh mekanisme pendataan berbasis domisili administratif (Bali Post, 2025). Kondisi ini konsisten dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa efektivitas konvergensi multisektor pada wilayah perkotaan padat sangat bergantung pada ketepatan pemetaan sasaran dan integrasi data lintas sistem (Jalaludin et al., 2025).

Ketiga, implementasi aksi konvergensi yang masih parsial. Sintesis literatur evaluasi kebijakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: pada aspek konteks, regulasi dan komitmen pemerintah daerah umumnya sudah kuat; namun pada aspek input, keterbatasan sumber daya manusia gizi, sarana prasarana, dan kualitas data e-PPGBM menjadi hambatan utama; sedangkan pada aspek proses, pelaksanaan delapan aksi konvergensi berjalan tetapi belum terintegrasi optimal antarperangkat daerah, dengan monitoring yang belum menghasilkan umpan balik memadai (Palastri & Rosdiana, 2026). Pola serupa turut ditemukan pada evaluasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), di mana jumlah kader relatif mencukupi namun kapasitas, pelatihan, dan sarana pendukung belum merata (Rahayu et al., 2024). Kemudian dari sisi konvergensi telah

diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang didalamnya mengukur indikator Intervensi Gizi Spesifik dan intervensi Gizi Sensitif yang disesuaikan dengan urusan di masing-masing perangkat daerah.

Keempat, keterkaitan langsung dengan capaian SDGs daerah. Indikator prevalensi stunting balita merupakan salah satu indikator resmi SDG 2.2 dalam kerangka pemantauan nasional maupun daerah. Ketidaksesuaian data antarsistem sebagaimana diuraikan di atas berdampak langsung terhadap keandalan pelaporan capaian SDGs Kota Denpasar, sekaligus berisiko menghambat proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang menjadi prinsip dasar tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Tren Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Bali, serta Kota Denpasar (2019-2025)

Tahun	Nasional (%)	Bali (%)	Kota Denpasar (%)	Sumber Data
2019	27,7	-	-	SSGI
2021	24,4	10,9	-	SSGI
2022	21,6	8,0	5,5	SSGI
2023	21,5	7,2	-	SKI
2024	19,8	8,7	10,4	SSGI
2025	n/a (SSGI belum terbit)	n/a	1,9 (klaim pencatatan lokal)	Data administratif Pemkot Denpasar

Sumber: diolah dari Palastri & Rosdiana (2026); Bali Post (2025); Media Indonesia (2025); Kompasdata (2023).

Kerangka Logis

Kerangka logis penanganan stunting di Kota Denpasar dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs dapat disusun melalui alur input-proses-output-outcome-impact sebagai berikut. Pada tingkat input, tersedia regulasi (UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 4 Tahun 2024, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025), kelembagaan TPPS berjenjang, tenaga kesehatan dan kader (KPM, kader posyandu banjar), serta sistem data (SSGI/SKI, e-PPGBM, Sigenting). Pada tingkat proses, kelengkapan tersebut diimplementasikan melalui delapan aksi konvergensi, meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan dan rembuk stunting, penetapan peraturan daerah/wali kota, pembinaan pelaksana kegiatan di tingkat desa/kelurahan, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi capaian, serta reviu kinerja tahunan.

Pada tingkat output, proses tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik (pelayanan kesehatan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, imunisasi) dan intervensi gizi sensitif (akses air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan keluarga). Pada tingkat outcome, output tersebut diharapkan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting balita yang valid dan terverifikasi. Pada tingkat impact, penurunan stunting yang berkelanjutan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target SDG 2.2 (mengakhiri segala bentuk malnutrisi) dan SDG 3.2 (mengakhiri kematian balita yang dapat dicegah), sekaligus mendukung SDG 1 (pengentasan kemiskinan, khususnya kelompok migran rentan), SDG 6 (air bersih dan sanitasi layak), serta SDG 17 (kemitraan dan keandalan data pembangunan).

Titik kritis dalam kerangka logis ini terletak pada mata rantai antara proses (sistem manajemen data dan pengukuran) dengan outcome (validitas angka prevalensi), karena tanpa keandalan data pada titik ini, seluruh capaian pada tingkat output tidak dapat diterjemahkan secara akurat menjadi bukti kontribusi terhadap target SDGs. Oleh karena itu, penguatan integrasi data menjadi prasyarat mendasar, bukan sekadar aspek teknis administratif semata.

Kondisi Eksisting

Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan siklus perencanaan pembangunan tahunan. Setiap awal tahun, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan Rembuk Stunting yang bertujuan menyepakati rencana kegiatan intervensi terintegrasi untuk dimuat dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya (Pos Bali, 2025). Pada tahun 2026, pelaksanaan konvergensi diperkuat melalui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang secara eksplisit menekankan peran kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai garda terdepan penjangkauan layanan, dengan penegasan bahwa "konvergensi harus nyata di lapangan, bukan hanya dalam dokumen perencanaan" (Barometer Bali, 2026).

Dari sisi kemitraan, Kota Denpasar turut memanfaatkan skema kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Generasi Maju Bebas Stunting (GMBS) yang telah berjalan sejak tahun 2023, yang berkontribusi pada klaim penurunan prevalensi hingga 1,9% pada tahun 2025, versi pencatatan lokal (Media Indonesia, 2025). Pada level provinsi, Bali juga mengembangkan platform Sigenting sebagai dashboard yang berfungsi untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi terhadap balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem,

sehingga data stunting di Bali dapat diakses secara real-time (Pemerintah Provinsi Bali, 2024).

Meskipun demikian, sejumlah tantangan tata kelola masih ditemukan dan konsisten dengan pola nasional. Sintesis sembilan studi evaluasi kebijakan aksi konvergensi di berbagai daerah di Indonesia mengonfirmasi bahwa aspek konteks kebijakan (regulasi dan komitmen) umumnya sudah kuat, tetapi aspek input mengalami keterbatasan tenaga gizi, sarana prasarana yang belum merata, dan kualitas integrasi data e-PPGBM yang masih lemah; sementara aspek proses menunjukkan pelaksanaan intervensi berjalan namun koordinasi antarperangkat daerah belum optimal serta monitoring-evaluasi belum konsisten di seluruh wilayah (Palastri & Rosdiana, 2026). Studi mengenai peran KPM turut menegaskan bahwa meskipun jumlah kader relatif mencukupi, kapasitas, pelatihan, dan integrasi data pendukung tugas pendataan dan pendampingan keluarga masih menjadi kendala di tingkat desa (Rahayu et al., 2024).

Pada konteks Kota Denpasar secara spesifik, kondisi urban dengan kepadatan tinggi dan populasi pendatang non-permanen menambah lapisan tantangan tersendiri. Tinjauan sistematis terhadap determinan stunting di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia menemukan bahwa pola dan faktor risiko stunting di kedua konteks tersebut berbeda secara signifikan, dengan wilayah perkotaan menghadapi tantangan spesifik seperti kepadatan permukiman, mobilitas penduduk, dan keterjangkauan layanan bagi kelompok migran, yang memerlukan strategi intervensi berbeda dari pendekatan yang lazim diterapkan di wilayah perdesaan (Dewi, Wirawan, & Muslihah, 2025). Namun demikian, sebagian besar studi evaluasi aksi konvergensi di Indonesia sejauh ini masih lebih banyak berfokus pada konteks kabupaten atau kota dengan karakteristik campuran perkotaan-perdesaan, sehingga model konvergensi kebijakan yang secara spesifik dirancang untuk kota inti (urban core) berkepadatan sangat tinggi seperti Denpasar relatif belum banyak dibahas.

Upaya Tata Kelola

Berdasarkan isu strategis dan kondisi eksisting yang telah diuraikan, penguatan tata kelola konvergensi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar dalam kerangka pencapaian SDGs dapat diarahkan melalui tujuh langkah strategis berikut.

1. Penguatan satu data stunting terpadu. Diperlukan mekanisme rekonsiliasi dan verifikasi lapangan secara berkala antara data SSGI/SKI (berbasis survei sampel) dan data e-PPGBM/Sigenting/GMBS (berbasis pencatatan administratif), dengan protokol yang jelas mengenai sumber data mana yang menjadi acuan resmi

pelaporan capaian SDG 2.2 di tingkat kota, disertai dokumentasi metodologis atas setiap perbedaan yang ditemukan.

2. Penajaman sasaran bagi kelompok rentan non-permanen. Perlu dikembangkan mekanisme pendataan adaptif yang menjangkau kelompok balita dari keluarga pendatang di rumah kos/kontrakan, misalnya melalui kerja sama dengan pengelola indekos, RT/RW, banjar, atau melakukan pendataan di pintu masuk Bali secara lengkap (pendataan tempat tinggal atau lokasi kerja baru yang dapat divalidasi) agar kelompok ini tidak luput dari cakupan intervensi maupun basis data resmi.
3. Penguatan kelembagaan TPPS hingga tingkat banjar/lingkungan, disertai peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader posyandu melalui pelatihan reguler, penyediaan sarana antropometri terstandar, dan penguatan sistem insentif kader.
4. Optimalisasi pendekatan berbasis kearifan lokal Bali, melanjutkan praktik baik yang telah terbukti efektif di tingkat provinsi, seperti pelibatan desa adat, posyandu berbasis banjar, serta sosialisasi melalui media tradisional, yang disesuaikan dengan konteks masyarakat urban Denpasar yang lebih heterogen.
5. Penguatan pembiayaan konvergen, melalui optimalisasi tagging anggaran belanja stunting dalam APBD Kota Denpasar, pemanfaatan dana kelurahan, serta perluasan skema kemitraan dengan sektor swasta sejenis program Generasi Maju Bebas Stunting (GMBS).
6. Integrasi pelaporan stunting ke dalam mekanisme pemantauan capaian SDGs kota, misalnya melalui penyusunan laporan pemantauan lokal (Local Progress Report) yang menyandingkan capaian indikator stunting dengan indikator SDGs lain yang saling terkait, seperti akses sanitasi layak, kemiskinan, dan ketahanan pangan keluarga.
7. Penguatan reviu kinerja tahunan berbasis bukti, dengan mendorong forum reviu kinerja aksi konvergensi tidak hanya menilai capaian administratif pelaporan delapan aksi, tetapi juga secara eksplisit membahas kesenjangan data sebagaimana ditemukan dalam kajian ini, sebagai bagian dari proses pembelajaran kebijakan (policy learning) lintas tahun.

Ketujuh langkah tersebut saling melengkapi dan perlu dilaksanakan secara simultan agar upaya percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar tidak hanya menghasilkan penurunan angka secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi yang valid dan terukur terhadap pencapaian target SDGs Kota Denpasar dan Provinsi Bali secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Provinsi Bali mencatat capaian penurunan stunting terbaik secara nasional, namun kondisi Kota Denpasar sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi menunjukkan dinamika tersendiri yang memerlukan perhatian khusus. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu strategis utama tidak semata terletak pada tingginya angka prevalensi, melainkan pada kesenjangan yang signifikan antara data survei nasional (SSGI 2024: 10,4%) dan data pencatatan administratif lokal (2025: 1,9%), yang mengindikasikan persoalan validitas dan integrasi data lintas sistem. Karakteristik urban Denpasar, khususnya tingginya populasi pendatang non-permanen, turut menambah kompleksitas dalam penajaman sasaran intervensi.

Pelaksanaan delapan aksi konvergensi di Kota Denpasar telah berjalan dan didukung oleh kelembagaan TPPS yang relatif lengkap serta inovasi kemitraan dengan sektor swasta, namun sejalan dengan pola nasional, implementasinya masih parsial pada aspek integrasi data, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pemerataan kapasitas kader di tingkat desa/kelurahan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keandalan pemantauan capaian SDG 2.2 di tingkat kota.

Penguatan tata kelola ke depan perlu diarahkan pada tujuh langkah strategis, yaitu penguatan satu data terpadu, penajaman sasaran kelompok rentan non-permanen, penguatan kelembagaan TPPS hingga banjar/lingkungan, optimalisasi pendekatan kearifan lokal, penguatan pembiayaan konvergen, integrasi pelaporan stunting ke dalam pemantauan SDGs kota, serta penguatan reviu kinerja tahunan berbasis bukti. Melalui langkah-langkah tersebut, percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang valid dan terukur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Provinsi Bali sebagai rujukan nasional dalam tata kelola percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026). Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026: Akses Sanitasi Layak Nasional Capai 86,73 Persen. Disampaikan dalam Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, Jakarta, 13 Agustus 2026.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2025). Kota Denpasar Dalam Angka 2025 (Vol. 33).
<https://denpasarkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a743ae15cbf31f6b287a264a/kota-denpasar-dalam-angka-2025.html>
- Bali Post. (2025). Angka Stunting di Bali Berdasarkan SSGI Meningkat, Ini Penjelasan Kadinkes.
 BALIPOST.com.[https://www.balipost.com/news/2025/11/12/505374/Angka - Stuntingdi-Bali-Berdasarkan-SSGI...html](https://www.balipost.com/news/2025/11/12/505374/Angka-Stuntingdi-Bali-Berdasarkan-SSGI...html)

- Bappeda Provinsi Bali. (2025). Buka Rembuk Stunting 2025, Wagub Bali Ajak Perkuat Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting. <https://bappeda.baliprov.go.id/2025/07/30/buka-rembuk-stunting-2025-wagub-bali-ajak-perkuat-kolaborasi-dalam-percepatan-penurunan-stunting/>
- Bappeda Provinsi Bali. (2025). Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Bali Tahun 2023. <https://bappeda.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Laporan-Evaluasi-SDGs-Prov-Bali-2023.pdf>
- Barometer Bali. (2026). Pemkot Denpasar Gelar Pra Musrenbang Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2026. <https://barometerbali.com/pemkot-denpasar-gelar-pra-musrenbang-aksi-konvergensi-percepatan-penurunan-stunting-2026/>
- detikHealth. (2025). Resep Bali Sukses Tekan Stunting, Terendah di RI! Angkanya 'Cuma' 8 Persen. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7950016/resep-bali-suksestekan-stunting-terendah-di-ri-angkanya-cuma-8-persen>
- Dewi, T. I. A. F., Wirawan, N. N., & Muslihah, N. (2025). Determinants of stunting in urban and rural areas of Indonesia: A systematic review. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 10(3), 860-874. <https://doi.org/10.30867/action.v10i3.2690>
- Jalaludin, M. Y., Fauzi, M. D., Sidiartha, I. G. L., John, C., Aviella, S., Noverly, E., Permatasari, A., & Muhandi, L. (2025). Addressing stunting in children under five: Insights and opportunities from Nepal, Bangladesh, and Vietnam—A review of literature. *Children*, 12(5), 641. <https://doi.org/10.3390/children12050641>
- Katmawanti, S., Paramita, F., Kurniawan, A., Talib, R. A., Samah, D. A., Wahyuni, O. S., Barlian, S. I., Desandyansyah, S. K. N., & An-Khofiyya, N. (2023). Influence of collaborative governance dynamics on stunting prevention after the COVID-19 pandemic in East Nusa Tenggara, Indonesia. *The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 54(Suppl. 2), 504-526.
- Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (2022). Kemendagri Dorong Implementasi Perpres 72 Tahun 2021 di Daerah Melalui 8 Aksi Konvergensi. https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/877/kemendagri_dorong_implementasi_perpres_72_tahun_2021_di_daerah_melalui_8_aksi_konvergensi
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). Kemenko PMK Apresiasi Provinsi Bali dalam Percepatan Penurunan Stunting. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-apresiasi-provinsi-bali-dalam-percepatan-penurunan-stunting>
- Kompasdata. (2023). Bali Capai Prevalensi Stunting Terendah di Indonesia. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6513de8ea8c414300d309503
- Media Indonesia. (2025). Pemkot Denpasar Berhasil Tekan Stunting hingga Menjadi 1,9 Persen. <https://mediaindonesia.com/nusantara/751767/pemkot-denpasar-berhasil-tekan-stunting-hingga-menjadi-19-persen>
- Palastri, B. N., & Rosdiana, W. (2026). Literatur review: Evaluasi kebijakan aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 52-65. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i1.1490>

- Pemerintah Provinsi Bali. (2024). SIGENTING: Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting. <https://sigenting.baliprov.go.id/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (2025).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>
- Pos Bali. (2025). Jaya Negara Buka Rembuk Stunting Kota Denpasar. <https://www.posbali.net/denpasar/1425761280/jaya-negara-buka-rembuk-stunting-kota-denpasar>
- Rahayu, L. S., Maulida, N. R., & Sofyaningsih, M. (2024). Kader Pembangunan Manusia sebagai pendukung aksi konvergensi penurunan stunting: Studi evaluasi di tingkat desa. *Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan*, 6(1), 50-57. <https://doi.org/10.36441/jtepakess.v6i1.2907>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Cetakan ke-4). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. (2024).
- Zen, N. H., Mageiasti, L., & Yulhendri. (2025). Analisis penerapan SDGs dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan literatur dan tantangan implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 775-785. h